

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIDOWNLOAD DI INTERNET

## *Legal Protection for the Holder of Copyright on Songs Down Loaded in Internet*

Theresia Nolda Agnes Narwadan<sup>1</sup>, Siti Ismijati Jenie<sup>2</sup>, Mustafa<sup>2</sup>

*Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

### ABSTRACT

This research aimed to understand the factors inhibiting legal protection for song creators from free internet-downloading and, causes for difficulties in punishing downloading songs from internet. It conducted field research, and library research for support. Considering its narrow scope of research location and respondents, the research applied qualitative analysis after data classification according to certain topics.

The research results show the followings:

1. The factors inhibiting legal protection, for song creators from free internet downloading include:
  - a. Creators' lack of understanding on their own economic rights.
  - b. Lack of appreciation from the society for the work of song creators, resulting in free internet downloading.
2. The dispute resolution faces difficulties in deciding the punishment, for free song downloading from internet, since the police have no accurate understanding on the Act no 19/2002 concerning copyrights. In addition, the creators must be more active to file their complaints, despite the fact that the infringement of song copyrights is categorized as ordinary delict in the Act no 19/2002, whenever they find out that their songs are offered for free download without their written permission. Song creators must play more active role as they are supposed to know better the originality of their creation.

**Keywords:** *legal protection, creators, songs, download.*

1. Jln. Cenderawasih Kav. 1900-01, Ciputat 15414.

2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## PENGANTAR

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam cara pengumuman. Sebagai contoh, seorang pencipta lagu ingin lagu ciptaannya dikenal dunia luas, maka sarana yang efisien adalah melalui internet, karena berharga murah dan memiliki jangkauan yang luas. Boleh saja orang *men-download* suatu data atau karya cipta dari internet, namun bagaimanakah syaratnya? Sepanjang belum diperoleh ijin dari penciptanya, maka karya cipta tersebut masih menjadi milik penciptanya. Dengan demikian, pembuatan *homepage* yang berisi lagu-lagu di internet, maka bukan hak seseorang untuk membuat *homepage* tersebut, tanpa mendapat persetujuan dari penciptanya.

Sejak tahun 1986 Presiden telah membentuk Tim Keppres 34, yang saat itu dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, bertujuan untuk membangun sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Di sisi lain, setelah Tim Keppres 34 dibentuk, dan ditengah operasi pembersihan yang terus dilakukan oleh Polri, dalam kenyataannya peredaran lagu di Indonesia 89% dikuasai oleh produk bajakan, hal ini dikemukakan oleh Dirjen HaKI dalam [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id), tertanggal 29 Juli 2003.

## Permasalahan

1. Faktor-faktor apakah, yang menjadi penghalang untuk melindungi pencipta, atas lagu yang *didownload* di internet?
2. Mengapa penyelesaian sengketa atas lagu yang *didownload* di internet, secara pidana tidak mudah dilaksanakan dalam praktek?

## Tinjauan Pustaka

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, jika diuraikan maka terungkap pengertian dan sifat hak cipta itu, yaitu:

- a. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, atau istimewa (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini, berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan ijin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan;
- b. Hak yang bersifat khusus, atau tunggal tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, mem-

perbanyak ciptaannya, dan memberi ijin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;

- c. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik keseluruhan maupun sebagian karena (Pasal 3 ayat (2)):

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karya lagu atau musik dalam pengertian Undang-undang 19/2002 diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya, termasuk notasi. Dengan pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu karya cipta, dan dengan demikian hak cipta atas ciptaan itupun hanya satu, walaupun ciptaan lagu atau musik tersebut diciptakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang, tetapi hak cipta atas ciptaan tersebut tetap hanya satu, dan dipegang secara bersama-sama. Pengertian *download* telah yaitu, proses mengambil data dari komputer pusat ke sebuah komputer lokal, atau mengambil informasi dari komputer lain yang sama-sama terhubung pada internet.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menjadi penghalang, untuk melindungi pencipta atas lagu yang *didownload* di internet, dan penyebab penyelesaian sengketa atas lagu yang *didownload* di internet tidak mudah dipidana. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (DKI Jaya). Alasan DKI Jaya dipilih sebagai lokasi penelitian, karena persengketaan tentang *download* lagu dari internet, berada di DKI Jaya. Data yang diperoleh dari penelitian, setelah dikelompokkan sesuai dengan topik-topik masing-masing, dianalisis secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor yang menghalangi perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu, yang *didownload* di internet

Pencipta dalam melaksanakan transaksi jual beli lagu, lebih menyukai penggunaan perjanjian lisan, dibanding dengan menggunakan perjanjian tertulis. Pencipta lagu lebih senang menggunakan perjanjian lisan, dengan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran, dibandingkan dengan menggunakan sebuah perjanjian tertulis, karena mereka beranggapan penggunaan kuitansi lebih sederhana. Mereka tidak perlu membaca berlembar-lembar kertas (kontrak), selain itu mereka kerap merasa bingung mengartikan klausula-klausula, yang tercantum di dalam kontrak. Di sini terlihat bahwa pemahaman dari pencipta lagu itu sendiri, tentang hak ekonomi mereka, masih kurang.

Kuitansi hanya akan mencantumkan keterangan bahwa telah diterima sejumlah uang sebesar Rp XXX,00 dari Tuan Y, guna pembayaran lagu 'Z'. Kuitansi tersebut diberi tanggal, diberi materai, dan ditandatangani. Keuntungan menggunakan kontrak bagi pencipta adalah, pencipta dapat mengetahui secara rinci mengenai hak dan kewajiban mereka, serta akibat hukum jika mereka tidak memenuhi kewajibannya, atau jika hak mereka dilanggar.

Hal ini dialami oleh SB pencipta lagu Tuhan. Lagu berjudul Tuhan miliknya telah dijual oleh SB pencipta, sekaligus pemegang hak cipta atas lagu Tuhan, kepada produser sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 1973, dengan sistem *flat pay* (sekaligus lunas). Penjualan lagu Tuhan, milik SB dilakukan dengan perjanjian lisan, dan kuitansi sebagai alat bukti.

Awal tahun 2000, SB mengetahui bahwa lagu Tuhan miliknya, telah ditawarkan untuk *didownload* secara gratis, oleh [www.ringtones.com](http://www.ringtones.com). Penawaran untuk *mendownload* lagu secara gratis ini, dilakukan oleh [www.ringtones.com](http://www.ringtones.com), atas ijin dari pihak produser A, yang pada tahun 1973 telah membeli lagu Tuhan dari SB. SB menganggap bahwa penjualan lagu Tuhan kepada pihak produser A yang dulu dilakukannya pada tahun 1973, hanyalah untuk perbanyakan dalam bentuk kaset. Memang sebelum menjual lagu Tuhan, SB sudah sering melakukan jual beli lagu dengan pihak produser A. Kebiasaan yang terjadi selama itu, lagu-lagu SB yang dijual kepada produser A dengan menggunakan kuitansi sebagai alat bukti, diedarkan dalam bentuk kaset. Ketika SB menjual lagu Tuhan, SB juga beranggapan bahwa lagu tersebut hanya akan diedarkan dalam bentuk kaset.

Awalnya lagu Tuhan, milik SB diedarkan dalam bentuk kaset. Dalam perkembangannya, produser ingin membuat sebuah album kompilasi.

Salah satu lagu dalam album kompilasi tersebut adalah lagu Tuhan. Awal tahun 2000, produser memberi ijin kepada [www.ringtones.com](http://www.ringtones.com) untuk menawarkan *download* lagu Tuhan secara gratis, kepada *users*. Penawaran *download* lagu Tuhan, bertujuan agar *users* tertarik, sehingga mau membeli album kompilasi, yang diedarkan oleh produser A.

Pihak SB, sebagai pemegang hak cipta lagu Tuhan, mengirimkan surat protes kepada produser A. SB menganggap dirinya tidak pernah memberi ijin kepada A sebagai produser, untuk menawarkan *download* lagu Tuhan secara gratis di internet, atau untuk mengizinkan pihak lain melakukan hal tersebut. Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa, "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang, dan pembeli memiliki kewajiban membayar harga pada waktu yang ditentukan.

Dalam jual beli lagu berjudul Tuhan, A selaku produser telah membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada SB. Angka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diperoleh berdasar kesepakatan antara A sebagai pembeli, dan SB sebagai penjual. Oleh karena itu, SB berkewajiban untuk menyerahkan lagu Tuhan ciptaannya kepada A. Penyerahan lagu Tuhan milik SB, bukan berarti A lantas berhak melakukan apa saja atas lagu Tuhan secara ekonomis. Kebiasaan pada tahun 1970-an, jual beli lagu dilakukan secara lisan, dengan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran. Selain itu pada tahun 1970-an, kebiasaan yang ada jual beli lagu diperuntukkan hanya satu judul album saja. Album kompilasi belum terlalu populer pada tahun 1970-an.

Walaupun jual beli lagu SB dilakukan secara lisan. A sebagai pembeli seharusnya menghormati kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Hal ini selaras dengan pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan, persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Hak cipta adalah selama hidup pencipta, ditambah dengan lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir, ditambah dengan lima puluh tahun sesudahnya. Lagu berjudul Tuhan milik SB, tidak termasuk di dalam kategori ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Di samping itu, jangka waktu perlindungan atas lagu berjudul Tuhan, juga belum

habis masa berlakunya. Jadi jika produser A, ingin menawarkan *download* lagu Tuhan secara gratis kepada *users*, A harus meminta ijin terlebih dahulu kepada SB. Produser A juga harus meminta ijin terlebih dahulu kepada SB, jika dikaitkan dengan hal pengalihan hak cipta. Pasal 3 ayat (1) UU 19/2002, menyebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian karena pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu, seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi (*licensor*), dengan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis dari suatu hak milik orang lain, yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya. Pelaksanaan lisensi hak cipta disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, yang jumlah atau besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. SB tidak pernah menghibahkan, atau memberi lisensi kepada produser A atas lagu berjudul Tuhan miliknya. Oleh karena itu, jika produser A ingin menawarkan *download* lagu Tuhan secara gratis kepada *users*, terlebih dahulu A harus meminta ijin kepada SB sebagai pencipta, sekaligus pemegang hak cipta lagu Tuhan.

### **Sulitnya penyelesaian secara pidana atas sengketa lagu yang *didownload* di internet, di dalam prakteknya**

Responden pertama, DK mengemukakan bahwa lagu ciptaannya yang berjudul Stasiun Balapan dan Sewu Kutha, ditawarkan untuk *didownload* secara gratis, oleh [www.nadadering.tripod.com](http://www.nadadering.tripod.com). Penawaran untuk *mendownload* lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan, ciptaan responden pertama ini, dilakukan tanpa ijin DK, sebagai pemegang hak cipta dari lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan. Atas tindakan yang dilakukan oleh [www.nadadering.tripod.com](http://www.nadadering.tripod.com), DK melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, pada tanggal 11 Agustus 2003, dengan nomor laporan No. Pol 1980/K/VII/2003/SATGA OPS. Laporan dari responden pertama memang diterima dengan baik oleh pihak kepolisian, namun pada akhirnya laporan dari DK, tidak diteruskan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian berpendapat, bahwa laporan DK tidak dapat diteruskan, karena kegiatan *mendownload* lagu secara gratis tersebut, belum ada aturan yang melarangnya.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh responden pertama DK, terlihat bahwa pihak kepolisian belum memahami sepenuhnya UU 19/2002. Kasus ini dilaporkan oleh DK pada tanggal 11 Agustus 2003. Berarti UU 19/2002 ini, telah efektif berlaku. UU 19/2002 ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2002, telah melewati masa sosialisasi selama 12 bulan sejak tanggal diundangkan, dan efektif berlaku sejak tanggal 29 Juli 2003.

Dalam UU 19/2002 Bab XIII yang membahas ketentuan pidana, pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa hak cipta itu, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Hak eksklusif artinya, hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut, tanpa ijin terlebih dahulu dari pemegangnya. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan media apapun, termasuk media internet.

Pihak [www.nadadering.tripod.com](http://www.nadadering.tripod.com), telah menyiarkan dan memperbanyak lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan, tanpa ijin terlebih dahulu dari pemegang hak ciptanya. Kegiatan menyiarkan tersebut dilakukan melalui media internet, dan perbanyakannya dilakukan melalui penawaran *download* lagu secara gratis. Memang kegiatan *download* lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan tersebut, dilakukan secara gratis. Artinya, secara ekonomi, pihak [www.nadadering.tripod.com](http://www.nadadering.tripod.com), tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan *download* lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan tersebut. Namun demikian, dapat dibayangkan kerugian secara ekonomi, yang telah diderita oleh pemegang hak cipta atas lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan, karena orang-orang tidak perlu lagi membeli kaset atau *compact disk*, yang berisi lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan, jika ingin mendengarkan. Cukup *download* lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan tersebut, dari [www.nadadering.tripod.com](http://www.nadadering.tripod.com), ke dalam *harddrive* miliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa UU 19/2002 sudah memiliki ketentuan pidana, mengenai tindakan penawaran *download* lagu,

tanpa ijin dari pemegang hak cipta, sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi polisi, untuk tidak meneruskan laporan responden pertama DK, sebagai pemegang hak cipta atas lagu Sewu Kutha dan Stasiun Balapan, dengan alasan kegiatan *mendownload* lagu secara gratis tersebut, belum ada aturan yang melarangnya.

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis data diketahui bahwa:

1. Dua faktor yang menjadi penghalang, untuk melindungi pencipta adalah:
  - a. Pemahaman yang kurang dari para pencipta lagu, mengenai hak ekonomi mereka.
  - b. Belum adanya penghargaan anggota masyarakat terhadap karya cipta pencipta lagu, mengakibatkan mereka tertarik untuk *mendownload* lagu secara gratis di internet.
2. Penyelesaian secara pidana atas sengketa lagu yang *didownload* di internet tidak mudah dilaksanakan dalam prakteknya, karena pihak kepolisian sendiri, belum memahami Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan:

1. Kepada pemerintah, agar melakukan sosialisasi ulang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 kepada masyarakat, khususnya kepada pencipta lagu dan pihak kepolisian.
2. Kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan sumber daya manusia, dalam rangka penerapan UU 19/2002 di masyarakat.
3. Kepada pencipta lagu agar lebih aktif mengadukan, jika menemukan lagu ciptaannya ditawarkan untuk *didownload* tanpa ijin darinya. Tindak pidana dalam UU 19/2002 termasuk delik biasa, namun pencipta sendiri yang lebih mengetahui keaslian ciptaan mereka.
4. Kepada masyarakat, walaupun kegiatan penawaran *download* lagu dilakukan secara gratis, namun seharusnya kegiatan tersebut dilakukan sejijin pencipta lagu yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biernat, John E, 2002, *Cyberlaw & E- Commerce*, Mcgraw-Hill Higher Education, USA.
- Lindsey, Tim., Damian, Eddy., Butt, Simon., Utomo, Tomi Suryo, 2002, *Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Maulana, Insan Budi., Khairandy, Ridwan., Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak*



*Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UIL, Yogyakarta.

Subekti, Tjitrosudibio, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

### **Jurnal**

Riswandy, Budi Agus, 2002, "Doktrin Fair Use Dan Kompleksitas Permasalahan Penanganan Pelanggaran Hak Cipta Di Internet (Studi Atas Sistem Hak Cipta Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18, Jakarta.